

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode (Siahaan dan Simanjuntak, 2020).

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi tujuan dari laporan tersebut. Selain itu, karakteristik kualitatif atas laporan keuangan yang baik telah ditetapkan dalam SFAC No. 8 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan baik jika mencakup

pelaporan yang relevan dan terpercaya. Pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan mekanisme yang paling efisien dan efektif untuk mendorong manajer dalam pengelola perusahaan.

Kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta informasi lainnya yang merupakan hasil dari proses akuntansi periode tertentu yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Triyanti, 2018). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pengguna.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2022 dinyatakan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. Perolehan tersebut sekaligus menandai Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta meraih predikat opini WTP untuk ke-14 kali berturut-turut (Adminwarta, 2023). Pencapaian opini WTP itu bukan akhir dari pencapaian. Tapi merupakan sebuah awal bagaimana Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bertekad melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat yang berdasarkan pada keuangan dapat sesuai dengan ketentuan. Capaian opini WTP itu dapat menjadi motivasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksaan laporan keuangan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional

pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian yang intern Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), menjelaskan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat diuji kebenarannya, netral, dan disajikan secara wajar. Salah satu tujuan pelaporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas.

Laporan keuangan dengan kualitas yang tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar, lengkap, transparan, dan akuntabilitas dengan tujuan agar laporan keuangan dapat

dipertanggungjawabkan. Selain kualitas laporan keuangan, kegunaan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator lain salah satunya yaitu audit internal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Tingkat akuntabilitas dan transparansi proses akuntansi bergantung pada kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas pelaporan keuangan di Pemerintah Daerah sebanding dengan Tingkat akuntabilitas dan transparansinya. Laporan keuangan yang baik, menunjukkan kesesuaian dan kinerja yang baik bagi seorang manajer wilayah. Kualitas pelaporan keuangan berfokus kepada tanggung jawab atau kewajiban pelaporan keuangan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, masih menghadapi berbagai permasalahan akuntansi lingkungan yang berakibat pada kualitas keuangan dan laporan keuangan di Pemda Kota Yogyakarta itu sendiri. Kurangnya pengakuan dan pengukuran biaya dan kewajiban lingkungan, seperti halnya biaya terkait pencemaran lingkungan, seperti pengelolaan limbah, remediasi tanah terkontaminasi dan sanksi atas pelanggaran lingkungan, seringkali tidak diakui ataupun dicatat secara memadai. Kewajiban lingkungan seperti restorasi pasca tambang ataupun dekontaminasi situs terkontaminasi itu juga seringkali tidak diakui dan dicatat, hal ini membuat sistem pengendalian internal terkait akuntansi lingkungan di pemda seringkali lemah, dan itu terjadi di banyak Pemda di Indonesia. Hal ini pun meningkatkan risiko kecurangan atau kesalahan dalam pengukuran, pengungkapan dan pelaporan informasi lingkungan.

Permasalahan akuntansi lingkungan ini berdampak negatif, seperti halnya gambaran tidak akuratnya tentang kesehatan keuangan pemda karena biaya dan kewajiban lingkungan yang tidak diakui atau dicatat membuat laporan keuangan tampak lebih baik daripada kenyataan. Kesulitan pengambilan keputusanpun menjadi dampak negatif karena kurangnya pengungkapan informasi lingkungan menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan tepat tentang alokasi sumber daya dan akuntabilitas pemda. Hal ini pun mengakibatkan meningkatnya risiko kecurangan atau kesalahan pada sistem pengendalian internal yang lemah.

Faktor akuntansi lingkungan dalam laporan keuangan merujuk pada bagaimana pemerintah mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan data keuangan terkait aspek lingkungan dalam operasinya. Hal ini menjadi semakin penting seiring dengan semakin luasnya perhatian terhadap tantangan lingkungan hidup, dan berbagai pemangku kepentingan termasuk investor, konsumen, dan pemerintah memberikan tekanan pada dunia usaha untuk lebih bertanggung jawab secara sosial. Pemerintah yang peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sering kali berupaya melaporkan informasi ini secara sukarela atau mengikuti kriteria yang sesuai, seperti upaya *Global Reporting Initiative (GRI)* atau *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*.

Selain akuntansi lingkungan, faktor audit internal memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya dalam hal kepatuhan kebijakan dan prosedur. Dalam hal tersebut, audit internal

menjamin bahwa peraturan dan proses tegas yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan dipatuhi dengan baik oleh seluruh departemen dan unit bisnis. Hal ini membantu menjamin bahwa informasi keuangan yang diberikan dalam laporan keuangan merupakan gambaran akurat dari transaksi bisnis sebenarnya. Dengan berfokus pada faktor yang tersebut, audit internal dapat memberikan keyakinan lebih kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan bahwa informasi yang diberikan merupakan representasi akurat dari posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Nugroho dan Setyowati (2019), audit internal (*internal audit*) merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan atau pemerintahan dengan menguji keandalan dan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal perusahaan atau pemerintahan.

Penelitian tentang pengaruh *internal audit* dan *environmental accounting* terhadap *usefulness financial reporting* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Setyowati (2019), Fauzi dan Wardono (2022) menunjukkan bahwa *internal audit* berpengaruh positif signifikan terhadap *quality of financial reporting*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Embong dan Rad (2018) menunjukkan bahwa *internal audit* berpengaruh positif signifikan terhadap *usefulness financial reporting*.

Menurut Syarifudin, (2014) mengatakan bahwa ternyata audit internal tidak mengerjakan secara langsung dalam proses penyusunan dan penyajian

laporan keuangan. Tugas utama auditor internal adalah melakukan pemeriksaan, pembinaan terhadap proses pelaporan keuangan dan sebagai konsultan manajemen. Keterbatasan jumlah aparat inspektorat, tingkat kompetensi dan luasnya cakupan pemeriksaan masih menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan mendetail, sehingga kinerja audit internal menjadi kurang optimal. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husni *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa *environmental accounting* berpengaruh positif signifikan terhadap *quality of financial reporting*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dan Rini (2018) menunjukkan bahwa *environmental accounting* berpengaruh positif signifikan terhadap *usefulness financial reporting*.

Faktor lain yang memengaruhi kegunaan laporan keuangan yaitu akuntansi lingkungan (*environmental accounting*). Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, akuntansi lingkungan merupakan gambaran biaya lingkungan agar *stakeholder* memiliki pandangan bahwa perusahaan atau pemerintahan mampu mengidentifikasi cara meminimalisir biaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dalam waktu bersamaan (Hamidi, 2019).

Peneliti melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan variabel *quality of financial reporting* sebagai variabel mediasi yang diperkirakan dapat memediasi pengaruh *internal audit* dan *environmental*

accounting terhadap *usefulness financial reporting*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Priharjanto dan Andriana (2020) menunjukkan bahwa *quality of financial reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap *usefulness financial reporting*.

Kontribusi penelitian ini adalah melakukan pengembangan dari penelitian yang dimana penelitian ini menambah variabel audit internal, akuntansi lingkungan, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel independen, dengan variabel kegunaan laporan keuangan sebagai variabel dependen. Peneliti menganggap bahwasanya audit internal, akuntansi lingkungan, dan kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi kegunaan laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu, terdapat variabel akuntansi lingkungan yang mana variabel tersebut jarang diteliti lebih dalam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap kegunaan laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran apakah pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan informasi yang ada di laporan keuangan. Peneliti termotivasi untuk melengkapi dari penelitian yang sudah ada dan memasukkan variabel baru serta mengkaji audit internal dan akuntansi lingkungan terhadap kegunaan laporan keuangan dalam konteks pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian selanjutnya dengan judul **“Pengaruh Audit Internal dan Akuntansi Lingkungan terhadap Kegunaan Laporan**

Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Mediasi Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan?
2. Apakah Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan?
3. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan?
4. Apakah Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
5. Apakah Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
6. Apakah Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan?
7. Apakah Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh Audit Internal berpengaruh positif terhadap Kegunaan Laporan Keuangan.
2. Menguji secara empiris pengaruh Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif terhadap Kegunaan Laporan Keuangan.
3. Menguji secara empiris pengaruh Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kegunaan Laporan Keuangan.
4. Menguji secara empiris pengaruh Audit Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5. Menguji secara empiris pengaruh Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6. Menguji secara empiris Audit Internal terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan.
7. Menguji secara empiris Akuntansi Lingkungan terhadap Kegunaan Laporan Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengemban ilmu akuntansi sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan bukti empiris mengenai

pengaruh audit internal dan akuntansi lingkungan terhadap kegunaan laporan keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel pemediasi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat mengoptimalkan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam mengambil keputusan dengan laporan keuangan daerah di Kota Yogyakarta.